

# Pesantren dan Masa Depan Kerukunan Beragama di Indonesia

Oleh: Badrun Alaena\*

## Abstrak

*Kebadiran panjang pesantren di tanah air yang membentuk dirinya menjadi lembaga pendidikan Islam berbasis kebudayaan, sebenarnya muncul akibat proses pengumpulan lama antara Islam yang dibawa oleh pesantren dengan budaya local di mana ia tumbuh. Pengumpulan lama itu membawa perubahan-perubahan evolutif dan rumit bagi pesantren itu sendiri, dan lingkungan di luarnya. Akan tetapi dengan perubahan-perubahan itu pula, kehadiran pesantren ternyata telah menciptakan cara keberislaman yang terbuka bagi pemeluknya, yang dapat disebut dengan berteologi inklusif sinkretik dalam keberislaman.*

*Rupanya berteologi seperti itu memang tidak diakui keberadaannya oleh pesantren akibat konstruk negatif yang ditimpakannya. Padahal pada kenyataannya berteologi inklusif sinkretik semacam itu tanpa disadari telah lama dipraktikkan oleh pesantren sendiri dan sebagian besar masyarakat religius Indonesia. Bahkan dengan berteologi seperti ini dapat memberikan sumbangan gagasan keberagaman yang sebetulnya spesifik ala Indonesia. Dan ini tentu saja akan mendorong kian terciptanya kerukunan beragama yang berakar di tanah air untuk kondisi saat ini dan kelak.*

Kata kunci: pesantren, kerukunan beragama

## A. Pendahuluan

Tujuan artikel ini disusun tidak lain berupaya menggambarkan suatu hipotesis awal mengenai eksistensi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang sebenarnya merupakan warisan masa lampau umat Islam Indonesia, akan tetapi kini keadaannya masih juga tetap eksis bahkan tumbuh berkembang sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Tumbuh berkembangnya pondok pesantren itu tidak hanya menyadarkan kehadirannya amat berguna bagi kepentingan perkembangan agama Islam itu sendiri, melainkan juga membawa implikasi positif bagi kemungkinan terwujudnya masa depan kekalnya hubungan yang rukun dan damai dengan agama-agama non-Islam di Indonesia.

Dengan membatasi pengertian pesantren dari sudut pandangan institusi pendidikan agama berbasis budaya (*the education of cultural basic*) yang tercipta dari hasil pengumpulan panjang dan hebat antara agama (Islam) dan budaya (lokal), artikel ini akan mengungkap pula apakah akibat

---

\* Penulis adalah Dosen Fakultas Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dari pergumulan itu, dapat menghasilkan sebuah paradigma berteologi keagamaan yang bercorak terbuka, sehingga mendorong kerukunan hidup beragama? Kalau jawabannya ya, bagaimana corak berteologi keagamaan yang terbuka itu dibangun oleh pondok pesantren? Dan pula, apakah lulusan (santri) yang dihasilkan oleh pondok pesantren yang terkenal ramah dan toleran itu, dapat dijadikan kriteria pokok bahwa corak berteologi yang dibangun itu memang terbukti cocok (kontekstual) untuk kondisi Indonesia yang plural ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar itu yang penulis lontarkan sendiri, uraian di bawah ini akan mencoba mengungkapkannya dari sudut pandang deskripsi sosiologis. terutama melihat perubahan-perubahan peranan religius yang dimainkan pesantren akibat pergumulannya dengan konteks budaya.

## **B. Karakteristik Dasar Pondok Pesantren**

Pondok pesantren (seterusnya disebut pesantren) selain disebut sebagai lembaga kebudayaan atau institusi subkultural,<sup>1</sup> ia juga dapat kategorikan sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi religius. Karena itu pula, pesantren dengan kedua pengertian itu dapat disebut juga sebagai lembaga pendidikan (agama Islam) yang berbasis budaya. Dengan basis pendidikan keagamaan seperti ini, sejak awal kehadiran pesantren pada kenyataannya memiliki peranan aktif dan meluas dalam proses perubahan kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan beragama. Peranan aktif dan meluas pesantren dalam proses perubahan kehidupan masyarakat itu ternyata --diakui atau tidak-- telah menempatkan dirinya menjadi bagian penting dari pelaku sejarah pembentukan masyarakat Indonesia, baik dalam skala lokal maupun nasional.

Dalam catatan di berbagai literatur maupun dokumen historis Indonesia terungkap bahwa sejak masa-masa yang paling awal bangsa-bangsa kolonial Eropa menjajah Tanah Air sampai masa pergerakan kebangsaan, banyak di antara pesantren yang memperluas fungsinya menjadi basis pergerakan nasional. Mereka aktif terlibat dalam menentang kolonialisme bangsa asing, bahkan berjihad memerangnya dengan mengangkat senjata. Di pesantren Tasikmalaya, Jawa Barat yang diasuh oleh K.H. Zainal Arifin, misalnya pesantren ini malah digunakan sebagai basis perjuangan melawan fasisme bangsa Jepang. Demikian pula peranan

---

<sup>1</sup> Sebagai subkultural, eksistensi pondok pesantren hadir menjadi bagian dari suatu kebudayaan tertentu. Di sini dalam proses kemunculannya, eksistensi pondok pesantren masuk ke dalam kebudayaan di mana ia hadir. Kedudukan subkultur terjadi karena dalam perjalanannya yang panjang antara eksistensi pondok pesantren dengan kebudayaan setempat mengalami hubungan timbal balik yang bersifat transformatif, Lihat, Abdurahman Wahid, *Bunga Rampai Pesantren* (Jakarta: Dharma Bhakti, tt), p. 9-42.

Pesantren Tebuireng Jombang yang dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada masa-masa revolusi fisik. Di pesantren ini, Rais Akbar KH. Hasyim Asy'ari mengeluarkan seruan jihad kepada masyarakat Jawa Timur agar membendung masuknya kembalinya kolonialisme bangsa Belanda ke Tanah Air. Seruan jihad itu kemudian membangkitkan kesadaran Islam masyarakat Jawa Timur untuk berani berjihad bahkan siap mati syahid juga dengan berperang *habis-habisan* menghancurkan tentara Belanda dan sekutu-sekutunya di kota Surabaya pada tanggal 10 Nopember 1945.

Dalam pada itu, seiring dengan proses transformasi sosial yang terus bergulir mengiringi laju pembangunan nasional, ternyata pesantren sebagai bagian dari elemen penting bangsa tidak saja dituntut oleh dirinya, melainkan pula oleh elemen lain untuk secara sadar bertanggung jawab memiliki kepedulian yang lebih riil. Kepedulian yang lebih riil ini, antara lain dapat ditunjukkan dalam kaitannya dengan eksistensi pesantren itu sendiri sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang dapat mengaktualisasikan dirinya, mengambil prakarsa inovatif dalam pengembangan sistem pendidikan Islam yang tidak bertentangan dengan kemajemukan Indonesia. Suatu realitas kemejemukan yang tidak hanya ada pada keragaman suku, etnik, golongan, tetapi juga dunia keagamaan. Kemajemukan ini tidak hanya lahir setelah bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, melainkan lebih jauh dari itu sebelum pesantren itu sendiri muncul yang akarnya telah mencapai ratusan tahun. Mpu Prapanca yang mengarang kitab Sutasoma pada abad ke 8 M. telah merekam fenomena kemajemukan tersebut dengan filsafat sosialnya tentang pluralisme agama melebihi filsafat sosial yang dicetuskan pemikir-pemikir Barat pada zamannya; *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua*; sekalipun berbeda-beda satu jua adanya karena tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang tidak sama. Sebagai seorang Budha, Empu yang satu ini memahami betul realitas Nusantara yang ternyata berbeda-beda agama, tetapi sebenarnya agama yang bermacam-macam itu memiliki tujuan yang sama. Dalam bentuk, masing-masing agama memang berbeda tetapi dalam visi ia tidak ada perbedaan karena sama-sama untuk mencapai kebaikan hidup dunia.

Persoalannya yang muncul kemudian ialah dapatkah pesantren yang merepresentasikan Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia mampu melakukan prakarsa inovatif dalam pengembangan sistem pendidikan keagamaan yang tidak mengancam eksistensi pluralisme agama tersebut? Bukankah selama ini pesantren dianggap sebagai lembaga tradisional (*kolot*), statis, dan berorientasi pada masa lampau sehingga kehilangan prakarsa inovatifnya di tengah pluralisme religius Indonesia yang moderen?

Memang, secara tradisional dapat dikatakan bahwa pondok pesantren merupakan kelembagaan pendidikan yang unik dan berbeda secara kultural dengan institusi pendidikan lainnya yang dapat dijumpai di Tanah Air. Kendatipun secara politik dan kelembagaan, pemerintah mengakui kedudukan pondok pesantren sama saja dengan lembaga pendidikan luar sekolah atau non formal pada umumnya, namun tetap saja dipandang unik (*uniqueness*). Keunikan ini, antara lain dapat dilihat dari adanya kewenangan yang sangat besar dari seseorang atau beberapa orang guru sebagai pengasuh sekaligus pemilik pesantren, dan semua murid yang diasuh diasramakan dalam ruang-ruang kecil yang disebut *gotakan*. Selain itu sistem pengajaran berlangsung dalam bentuk *wetonan* dan *sorogan*, atau kadang-kadang dalam bentuk sekolah/madrasah dengan mata pelajaran, jenis, dan tingkatan sekolah yang disesuaikan dengan program kitab kuning yang diselesaikannya, serta uniknya lagi menjadikan tempat ibadah (masjid) sebagai pusat kegiatan pesantren.<sup>2</sup>

Dalam metode pengajaran *wetonan*, misalnya dilakukan dengan cara guru membaca buku asing (kitab kuning berbahas Arab) dalam waktu tertentu dan murid membaca kitab yang sama, lalu mendengarkan dan menyimak mengenai bacaan guru tersebut. Sementara metode pengajaran *sorogan* berlangsung apabila murid menyodorkan sebuah kitab kepada guru untuk dibaca, dan jika terjadi kesalahan atau kekeliruan langsung dibetulkan oleh guru saat itu juga.<sup>3</sup> Keunikan lainnya juga ditunjukkan dari tidak adanya pembagian dan pembatasan usia murid sebagai anak didik dalam memasuki masa pendidikan di pesantren. Artinya setiap murid yang belajar di pesantren tidak dibatasi, baik usia maupun masa studinya, ia bebas menentukan dirinya sendirinya kapan memulai dan mengakhiri masa belajar. Bisa saja seorang murid menempuh waktu belajar hanya cukup satu tahun, bisa pula seumur hidupnya ia tinggal di pesantren.

Pada awal masa pertumbuhannya, sebenarnya fungsi utama pesantren ialah melakukan pendalaman ilmu agama atau biasa disebut dengan *tafaqub fiddin* untuk dakwah pembinaan umat. Fungsi ini kemudian dalam perkembangannya meluas untuk berbagai kepentingan, baik yang bersifat ideologis maupun praktis, seperti sebagai tempat pengkajian ilmu-ilmu keislaman klasik, institusi yang melahirkan kader ulama atau pemimpin agama (*religious leader*) yang kelak berfungsi sebagai pelestari ilmu-ilmu agama dan menjadi benteng moralitas umat, bahkan kadang-kadang menjadi markas gerakan yang bernuansa politik. Jadi dari

---

<sup>2</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986), Cet. II, p. 14-15.

<sup>3</sup> Abdurrahman Saleh, *Pedoman Pembinaan Pesantren*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1988), p. 11.

contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kepentingan kehadiran pondok pesantren meluas ke dalam tiga tujuan, yakni kepentingan pengembangan epistemologi, etika agama, dan *leadership* baik kepemimpinan agama maupun politik.

Walaupun kehadiran pesantren terkesan sekadar menyelenggarakan pendidikan tradisional sebagaimana dijelaskan di atas, namun pada kenyataannya tidak demikian. Ada di antara pesantren yang memiliki prakarsa mengantisipasi tantangan perubahan situasi dan kondisi eksternal yang terjadi di lingkungannya dengan cara, antara lain *pertama*, oleh karena kebutuhan umat, ia mendirikan jenjang pendidikan formal dan moderen yang berbeda dengan pendidikan tradisional. Jenjang pendidikan formal dan modern yang diselenggarakan di pesantren juga beragam. Tidak saja dari jenjang TK, SD sampai SMU, malahan ada yang sudah sampai ke tingkat pendidikan tinggi.

Tentu jenjang pendidikan yang diselenggarakan di tiap-tiap pesantren berbeda tergantung dari tingkat kebutuhan dan kebijaksanaan masing-masing pimpinan pesantren. Di pesantren A, misalnya menyelenggarakan jenjang pendidikan setingkat SD. Kebijakan menyelenggarakan pendidikan setingkat SD muncul karena faktor kebutuhan yang ditentukan oleh persepsi masyarakat di sekitar pesantren tersebut mengenai pentingnya pendidikan SD. Sedangkan di pesantren B menyelenggarakan jenjang pendidikan setingkat SLTP, dengan alasan pimpinan pesantren melihat jumlah santri yang berusia anak didik setingkat SLTP cukup banyak.

Tetapi tidak semua pesantren yang ada di Tanah Air menyelenggarakan jenis pendidikan yang dimaksud, hanya sebagian saja yang melakukan langkah inovatif. Bahkan ada pesantren yang sama sekali tidak menyelenggarakan jenis pendidikan tadi, seperti yang terdapat di Pesantren Al-Fadhlu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Bisa jadi faktor ketiadaan ini dikarenakan tidak adanya kebutuhan dan kebijaksanaan penyelenggaraan jenis pendidikan formal yang relevan atau mungkin bertentangan dengan fungsi dan eksistensi pesantren itu sendiri sembagi lembaga pendidikan tradisional.

*Kedua*, ada di antara pesantren yang justru kental dengan aroma politiknya sehingga ia menjadi pusat legitimasi politik bagi pimpinan partai politik yang ingin menjadi pemimpin negara, seperti yang terjadi di Pesantren Langitan, Wedung Tuban, Jawa Timur. Pesantren ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dengan Forum Langitan-nya yang berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi presiden keempat, sekalipun kemudian jatuh karena diturunkan dari jabatannya yang bergengsi itu. *Ketiga*, ada juga di antara pesantren yang mengambil prakarsa menjadikan fungsi

institusinya sebagai lembaga LSM, seperti Pesantren *Maslakul Huda* di Kajen Pati, Jawa Tengah yang terkenal dengan program kesehatan reproduksi masyarakat, atau Pesantren *Edi Mancoro* Salatiga yang kesohor sebagai pesantren pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat melalui kegiatan koperesi dan ketrampilan ekonomi lainnya.

Tetapi meskipun banyak di antara pesantren yang mengambil prakarsa kreatif dengan berbagai terobosan baru untuk menunjang eksistensinya, orientasi pendidikan kegamaannya yang tradisonal tetap dipertahankan. Justru dari orientasi ketradisionalan itu yang menjadikan karakteristik dasar pesantren terus berkembang dinamis dalam merespon positif tantangan pluralisme agama yang kian hadir di lingkungan sekitar pesantren dimana didirikan.

### C. Pesantren, Agama, dan Pluralisme

Seperti dimaklumi bersama, gerak kehidupan bangsa Indonesia di berbagai segi yang kini terius mengalami perubahan dinamik menuju harapan yang lebih baik dan bermutu. Agama sebagai salah satu sisi kehidupan yang penting, rupanya selalu menjadi pembicaraan menarik sekaligus juga mencemaskan. Pembicaraan yang ditumpukan kepada agama itu, antara lain ternyata agama dapat menjadi pemicu timbulnya disintegrasi sosial, walaupun dalam konteks lain dapat pula menjadi faktor pemersatu.<sup>4</sup>

Disintegrasi sosial yang disebabkan oleh agama pada umumnya muncul dalam bentuk ketegangan antarkelompok, bahkan pertikaian yang seringkali dinampakkan melalui serangkaian aksi kekerasan. Memasuki pertengahan tahun 1990-an aksi semacam itu mulai merebak di sejumlah daerah negara Indonesia, bahkan sampai sekarang. Jika berlarut-larut dan meluas, aksi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kelangsungan kerukunan hubungan antaragama, dan ujung-ujungnya menimbulkan kerugian yang tidak diharapkan. Tentu banyak pihak yang akan menanggung rugi, lebih lagi bagi pemerintah yang selama ini paling giat membangun kerukunan untuk stabilitas politik.

Masalahnya kemudian mengapa agama justru menjadi pemicu faktor pemecah belah suatu masyarakat? Padahal bukankah setiap agama yang hadir ke dunia ini membawa misi kemanusiaan yang luhur; menjanjikan kedamaian dan keselamatan bagi pemeluknya? Kalau demikian halnya, kemungkinan jawabannya ialah dengan menelusuri kembali persepsi (pendidikan) agama yang diajarkan. Agama yang diajarkan selama ini

---

<sup>4</sup> Soetjipto Wirosardjono, "Jalan Menuju Toleransi Beragama di Indonesia", pengantar dalam *Agama dan Pluralitas Bangsa*, (Jakarta: P3M, 1991), p. ix.

dipandang sebagai refleksi iman. Iman itu sendiri berkaitan dengan apa yang oleh orang beriman disebut sebagai pengalaman iman. Suatu pengalaman yang disentuh oleh Yang Mengatasi, Yang Menentukan, Sang Pencipta, Arah dan Tujuan Hidup, Yang Ilahi atau Allah.<sup>5</sup> Iman pada akhirnya berintikan pada sebuah pengakuan bahwa hanya Tuhan yang diyakini sebagai pembuat alam semesta dan seisinya, terlepas dari pengakuannya itu diartikulasikan secara konkrit atau abstrak. Maka pengalaman agama selalu merupakan segi dari iman. Ajaran agama bukanlah sekedar dari teori, melainkan merumuskan iman dan mengarahkan perilaku (etika) orang-orang beriman.<sup>6</sup> Tetapi selain memberikan ajaran tentang tata nilai dan perilaku hidup, dengan sendirinya agama juga berusaha menanamkan keyakinan akan “kebenaran mutlak” atau absolutisasi ajaran yang dibawanya, kepada pemeluknya masing-masing.<sup>7</sup> Absolutisasi ajaran inilah yang dapat menumbuhkan keyakinan pasti; menghilangkan keraguan seseorang akan dari agama yang dianut. Karena bagaimanapun kalau tanpa keyakinan pasti, keberagaman seseorang cenderung diragukan.

Pandangan setiap agama akan absolutisasi ajaran apabila dilihat dari kepentingan eksistensi masing-masing agama memang sudah semestinya, mengingat; *pertama*, agama menyangkut kualitas dan pilihan rohani manusia dan; *kedua* dengan pandangan seperti ini memungkinkan setiap agama mampu mempertahankan ajaran dan identitasnya masing-masing.<sup>8</sup> Selain itu, keyakinan akan kebenaran mutlak ajaran pada gilirannya membuat kedudukan masing-masing agama tetap berakar dan berkembang. Tetapi kosekuensi logis dan keyakinan ini bisa melahirkan pandangan dan sikap fanatik dari masing-masing pemeluknya yang tidak saja sekedar meyakini kebenaran mutlak ajaran agama yang dipilihnya, melainkan juga akan merasa menanggung “tugas suci”, bagaimana harus meyakinkan kepada orang lain akan kebenaran mutlak ajaran agamanya.<sup>9</sup> Fanatisme dan beban atas tugas suci ini yang kemudian dapat merangsang keinginan di masing-masing agama untuk bersaing dalam menyebarkannya di masyarakat. Ketika persaingan itu diliputi suasana yang tidak sehat dan diskriminatif, maka pertikaian fisik pun tidak bisa dihindarkan.

---

<sup>5</sup> John Titaley, et.al., *Berteologi di Tengah Masyarakat Majemuk Indonesia*, (Semarang: Bina Jemaat, 114), p. 54.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 54

<sup>7</sup> Moeslim Abdurrahman, “Posisi Berbeda Agama dalam Kehidupan Sosial di Pedesaan”, dalam Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran* (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), p. 132.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 138-9.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 139.

Dari sisi ini, absolutisasi ajaran agama tidak hanya menjadi persoalan iman, tetapi juga menimbulkan problem sosial, lebih-lebih jika ia berpotensi menciptakan keberagaman yang cenderung eksklusif di tengah masyarakat yang multi agama. Pandit Jawaharlal Nehru dengan jelas menandakan bahwa agama-agama yang bercorak semitik pada kenyataannya mengandung muatan eksklusif, sehingga tidak menghadirkan pluralisme bahkan katanya, mereka tidak memiliki semangat toleransi dan keterbukaan sebagaimana yang terdapat di dalam agama Hindu.<sup>10</sup> Kritik dari Nehru ini apabila dilihat dari sisi historik kehadiran agama-agama di Indonesia menjadi tidak relevan. Karena agama-agama, khususnya kelima agama resmi yang diakui agama Pemerintah yang masuk ke Nusantara pada masa lalu pada kenyataannya tidak melewati jalan kekerasan atau pertempuran. Semua agama resmi itu tersebar dalam suasana yang damai dan pelan-pelan. Lagi pula semua agama yang ada tiba di sini juga tidak ada yang di bawa oleh panglima perang atau melalui *military conquest*.<sup>11</sup> Jika misalnya, suatu agama yang datang di bawa oleh seorang panglima dan yang lain sebagi tawanan. Yang satu menang dan yang lainnya terkalahkan. Tentu saja keadaan kalah-menang seperti ini bukanlah tujuan dari agama.

Lagi pula secara kultural, di Nusantara tidak pernah mengalami “goncangan besar” lantaran agama yang datang dengan damai itu sifatnya tidak menghilangkan agama yang sudah ada tetapi bersifat akomodatif.<sup>12</sup> Setiap agama yang datang tidak jarang mengalami tahapan penyesuaian dengan agama-agama yang hadir lebih dahulu yang disebut dengan pendekatan sinkretik. Di Jawa misalnya, kendati kebanyakan masyarakat beragama Islam, tetapi agaknya kehidupan mereka masih mempertahankan keyakinan lama yang dipengaruhi oleh ajarani Hindu-Buddha yang bercampur dengan kepercayaan asli Jawa seperti yang dijelaskan oleh Clifford Geertz dalam bukunya, “Agama Jawa”. Hal demikian terjadi karena pada kenyataannya kedatangan Islam di Jawa tidak ke daerah pagan, melainkan masuk ke dalam masyarakat yang sarat dengan tradisi Hindu-Buddha yang telah berkembang berabad-abad sebelumnya.<sup>13</sup> Akibatnya yang terjadi kemudian ialah agama Islam yang besar secara kuantitatif itu masuk sebagai sub kebudayaan Jawa belaka, bukan

---

<sup>10</sup> TV. Philip, *Christianity and Religious Pluralism*, (Bengalore: United Theological College, 1988), p. 30.

<sup>11</sup> Soetjipto Wirosardjono, “Jalan Menuju Toleransi...”, p. 8.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat Kyai di antara Usaha Pembangunan dan Mempertahankan Identitas Lokal di Daerah Muria*, (Amsterdam: VU University Press, 1994), p. 24.



sebaliknya. Dengan kesimpulan lain, apa yang sesungguhnya adalah Islam yang “di Jawakan” daripada “Jawa yang di Islamkan”.<sup>14</sup>

Dari signifikansi pengertian tadi, menurut Geertz penyebarab Islam di Jawa yang serba akomodatif itu telah menghasilkan bentuk agama Islam yang tidak berpretensi memiliki semangat yang berkobar-kobar, seperti ketika berperang tetapi semangat yang toleran. Bentuk Islam yang digambarkan secara apresiatif itu merupakan hasil dari fungsi pesantren sebagai pusat penyebaran agama (dakwah Islam) mula-mula sebagaimana yang ditegaskan oleh Profesor Johns :

*Lembaga-lembaga pesantren itulah yang paling menentukan watak keislaman dari kerajaan-kerajaan Islam, sampai ke pelosok-pelosok. Dari lembaga-lembaga pesantren itulah asal-usul sejumlah manuskrip tentang pengajaran Islam di Asia Tenggara, yang tersedia secara terbatas, yang dikumpulkan oleh pengembara-pengembara pertama dari perusahaan-perusahaan dagang Belanda dan Inggris sejak akhir abad ke-16. Untuk dapat betul-betul memahami sejarah Islam di wilayah ini, kita harus mulai mempelajari lembaga-lembaga pesantren tersebut, karena lembaga-lembaga inilah yang menjadi anak panah penyebaran Islam di wilayah ini.*<sup>15</sup>

Oleh karena itu pula, selain sebagai lembaga pendidikan Islam tertua yang dijadikan pusat penyebaran agama mula-mula, pesantren juga merupakan sistem pendidikan yang diterima dari model pengajaran Hindu di Jawa. Dari model pendidikan agama yang menyesuaikan dengan pendidikan agama Hindu dan Budha inilah, pesantren turut menciptakan pendidikan keagamaan yang inklusif. Sebuah paradigma pendidikan agama inklusif yang lahir dari pandangannya yang positif dari sinkretisme agama. Sinkretisme agama ini lahir karena cara pandang pesantren yang melihat penyesuaian itu sebagai salah satu cara beragama yang cocok ditengah kultur Jawa yang mempertahankan nilai-nilai harmonitas. Disini agama tidak dilihat sebagai rumusan dogma, tetapi fungsinya dogma itu sendiri yang mengarahkan perilaku pemeluknya (fikih) untuk menyesuaikan kontek. Jika konteks Jawa yang dibangun dengan kultur harmonisasi, maka penyesuaian merupakan tuntutan yang harus dilakukan pesantren sebagai acara untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan eksistennya sebagai media penyebar agama. Perilaku sekalipun secara teologi, model pendidikan sinkretis ini banyak dikritik karena dapat mengancam iman yang telah dirumuskan menjadi dogma, tetapi dari perspekti perilaku

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Dikutip dari Zamakhsary Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), p. 17-18.

keagamaan, justru model ini menjadikan pemeluknya amat ramah dan toleran terhadap agama-agama lain. Karena itu sudah semestinya pesantren sebagai bagian dari pluralisme itu sendirinya dapat mempertahankan model pendidikan keagamaan yang demikian di tengah kehidupan yang sarat pluralisme agama.

Memang dari pandangan kaum teolog yang berpegangan mutlak pada nilai-nilai religius yang puritan (murni), berteologi inklusif-sinkretik yang dicontohkan pesantren tersebut, masih diragukan. Bahkan dipertanyakan keabsahan eksistensinya. Akan tetapi jika itu dipandang dari sisi rasionalisasi *maslahah* (fungsional) yang dilahirkan dari berteologi seperti ini, ternyata positif dalam mewujudkan kerukunan hidup di masyarakat, termasuk kerukunan beragama.

Karenanya pula dengan berteologi seperti itu, sadar atau tidak sadar justru ia telah terbukti membentuk perilaku keagamaan pemeluknya yang ramah dan tolean terhadap lingkungannya. Dengan demikian model keberislaman terbuka bercorak sinkretik itu tidak ada salahnya juga kalau dapat diakui secara teologis, sehingga keberadaannya mampu mendorong kehidupan yang rukun di antara umat beragama di tanah air. Hanya dengan berteologi seperti itu, akar kultur keagamaan masyarakat Indonesia dalam keberagaman yang dipraktikkannya selama ini dapat menemukan keabsahan teologisnya, dan dengan demikian, juga menenangkan iman di hatinya.

#### **D. Penutup**

Kehadiran panjang pesantren di tanah air yang membentuk dirinya menjadi lembaga pendidikan Islam berbasis kebudayaan, sebenarnya muncul akibat proses pengumpulan lama antara Islam yang dibawa oleh pesantren dengan budaya local di mana ia tumbuh. Pengumpulan lama itu membawa perubahan-perubahan evolutif dan rumit bagi pesantren itu sendiri, dan lingkungan di luarnya. Akan tetapi dengan perubahan-perubahan itu pula, kehadiran pesantren ternyata telah menciptakan cara keberislaman yang terbuka bagi pemeluknya, yang dapat disebut dengan berteologi inklusif sinkretik dalam keberislaman.

Rupanya berteologi seperti itu memang tidak diakui keberadaannya oleh pesantren akibat konstruk negative yang ditimpakannya. Padahal pada kenyataannya berteologi inklusif sinkretik semacam itu tanpa disadari telah lama dipraktikkan oleh pesantren sendiri, dan sebagian besar masyarakat religius Indonesia. Bahkan dengan berteologi seperti ini dapat memberikan sumbangan gagasan keberagaman yang sebetulnya spesifik *ala* Indonesia. Dan ini tentu saja akan mendorong kian terciptanya

kerukunan beragama yang berakar di tanah air untuk kondisi saat ini dan kelak.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Moeslim, "Posisi Berbeda Agama dalam Kehidupan Sosial di Pedesaan", dalam Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran* Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat Kyai di antara Usaha Pembangunan dan Mempertahankan Identitas Lokal di daerah Muria*, Amsterdam: VU University Press, 1994.
- Philip, TV., *Christianity and Religious Pluralism*, Bengalore: United Theological College, 1988.
- Saleh, Abdurrahman, *Pedoman Pembinaan Pesantren* Jakarta: Departemen Agama R.I., 1988.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah* Jakarta: LP3ES, Cet. II, 1986.
- Titaley, John, et.al., *Berteologi di Tengah Masyarakat Majemuk Indonesia*, Semarang: Bina Jemaat.
- Wahid, Abdurahman, *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: Dharma Bhakti, tt.
- Wirosardjono, Soetjipto, "Jalan Menuju Toleransi Beragama di Indonesia", Pengantar dalam *Agama dan Pluralitas Bangsa*, Jakarta: P3M, 1991.